

TABLOID

RUMAH RAKYAT

• DPRD KOTA MAKASSAR

TOK! RANPERDA APBD T.A 2025 DISAHKAN



EDISI NOVEMBER 2024



PENGANTAR

PEMBINA/PENASEHAT

Ketua DPRD Kota Makassar
Rudianto Lallo, SH

Wakil Ketua I
Adi Rasyid Ali, SE

Wakil Ketua II
Ir. Andi Suhada Sappaile

Wakil Ketua III
H. Andi Nurhaldin NH, SE

Ketua Komisi A
Rahmat Tagwa Qurais

Ketua Komisi B
Erick Horas

Ketua Komisi C
Sangkala Saddiko

Ketua Komisi D
Andi Hadi Ibrahim Baso

PENGARAH:

Sekretaris DPRD Kota Makassar
H. Dahyal, S.Sos., M.Si.

PENANGGUNG JAWAB:

PPID Pembantu Sekretariat
DPRD Kota Makassar

Kabag Umum
Dr. Muhajir, SKM., M.Kes

Kabag Keuangan
Abd. Kadir, SE., MM

Kabag Persidangan
Dr. Hj. Widiawati Said, S.Sos., S.Pd

Kabag Perlengkapan
Daniel Katto, SE., MM

ALAMAT KANTOR:

DPRD Kota Makassar
Jl. Andi Pangerang Pettarani,
Blok E No. 1-2 Tidung, Kec.
Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90222

Salam Hormat Pembaca,

Edisi November kali ini hadir dengan fokus utama yang sangat krusial bagi pembangunan Kota Makassar: Ranperda APBD 2025: "Menyusun Anggaran untuk Masa Depan" Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menjadi momentum strategis untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan kota dapat tercermin dalam setiap alokasi anggaran. Melalui rubrik utama, kami mengupas perjalanan pembahasan Ranperda APBD 2025 di DPRD Kota Makassar. Bagaimana prioritas pembangunan diformulasikan? Apa saja sektor yang akan menjadi fokus utama? Dan bagaimana komitmen DPRD untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini? Semua kami sajikan secara lengkap untuk memberikan gambaran kepada masyarakat.

Edisi ini juga menyoroti aspirasi masyarakat yang menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD. Dari kebutuhan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, kami menghadirkan analisis mendalam untuk membantu pembaca memahami bagaimana anggaran ini dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang di tahun mendatang. Melalui edisi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami proses penyusunan anggaran daerah sekaligus berperan aktif dalam mengawasi implementasinya. Karena pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kerja sama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Selamat membaca, dan mari bersama kita wujudkan Makassar yang lebih sejahtera dan berdaya saing di 2025!

Salam hangat, 29 November 2024

DAFTAR ISI

- 04** Bapemperda DPRD Makassar Bahas Sejumlah Propemperda Tahun 2025
- 05** DPRD Makassar Tetapkan Renja Tahun 2025, Pj Sekda Tekankan Pentingnya Libatkan Seluruh
- 06** Banggar DPRD Makassar Bahas Nota Kesepakatan KUA APBD 2025
- 07** Banggar Gelar Rapat Lanjutan Pembahasan KUA PPAS Rancangan APBD 2025
- 08** DPRD Makassar Terima Aspirasi Solidaritas Aktivis Pemerhati Hukum Sulsel
- 09** Ketua DPRD Didaulat Baca Sejarah Kota pada Peringatan Hari Jadi Makassar ke-417
- 10** Sekretaris DPRD Makassar Turut Hadiri Peringatan Hari Jadi Makassar ke-417 di Lapangan Karebosi
- 11** Rapat Banggar DPRD Makassar Dengarkan Sejumlah Prioritas Setiap OPD
- 12** DPRD Makassar Kawal Aspirasi Atlet Disabilitas, Tuntutan Bonus Jadi Fokus Utama
- 13** Seluruh Komisi DPRD Makassar Gelar Rapat Bersama Mitra Kerja
- 14** Camat Ujung Tanah Hadir Rakor Bersama Komisi A DPRD Makassar
- 15** Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Terkait Anggaran Pembinaan Prestasi Atlet dan Cabor
- 16** Komisi C DPRD Terima Aspirasi FPR Terkait IMB dan Izin Usaha Pertokoan
- 17** DPRD Bersama Pemkot Makassar Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025
- 18** Banggar DPRD Makassar Kunker di DPRD Badung Bali
- 19** DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Terhadap Ranperda APBD 2025
- 20** Jalin Silaturahmi Forkopimda, Dandim 1408/BS Berkunjung ke DPRD Makassar
- 21** Fraksi-fraksi DPRD Makassar Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Penjelasan Wali Kota
- 22** Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar, Peningkatan PAD Tuai Apresiasi
- 23** Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP, Terkait Pembayaran Ganti Rugi Tanah Warga
- 24** DPRD Makassar Desak Pemkot Cairkan Dana Hibah KONI 2024
- 25** Beri Kuliah Umum, Sekretaris DPRD Makassar Jelaskan Tentang Proses Legislasi Daerah
- 26** DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025
- 27** Pjs Wali Kota Paparkan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda APBD 2025
- 28** Wakil Ketua DPRD Makassar Terima Audiensi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNM
- 29** DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2024
- 30** Sekretariat DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Korpri ke-53
- 31** Anggota DPRD Kota Makassar Reses Pertama Awal Desember
- 32** DPRD Makassar Soroti Minimnya Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal
- 33** Dewan Minta Direksi Perusda-BUMD Mundur Jika Gagal Penuhi Target
- 34** DPRD Makassar Harap OPD Agar Efektif dan Efisien Menggunakan Anggaran
- 35** ADAMA Inovasi Tingkatkan Transparansi Anggaran di DPRD Makassar
- 36** Dokter Jelaskan Makanan Ini Bisa Bantu Hancurkan Batu Ginjal
- 37** Bolehkah Olahraga saat Pilek?



Bapemperda DPRD Makassar Bahas Sejumlah Propemperda Tahun 2025

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar gelar rapat pembahasan sejumlah Program Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Rapat ini berlangsung di ruang Rapat Bapemperda DPRD Makassar, Jumat (1/11/2024).

Rapat dipimpin langsung Ketua Bapemperda, Basdir, dan dihadiri sejumlah anggota Bapemperda DPRD Makassar.

Sejumlah prioritas Program pembentukan Peraturan Daerah dirumuskan untuk dibentuk pansus (panitia khusus) hingga pembahasan secara mendalam nantinya.

Tentunya prioritas yang dimasukkan melihat kebutuhan dan urgensi di tengah masyarakat.



DPRD Makassar Tetapkan Renja Tahun 2025, Pj Sekda Tekankan Pentingnya Libatkan Seluruh

Pj Sekertaris Daerah Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mewakili Pjs Wali Kota Makassar, Rabu (6/11/2024), dalam rangka penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD untuk tahun 2025.

Irwan Adnan dalam Berbagai tekanannya bahwa penetapan rencana kerja ini merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan daerah yang melibatkan seluruh elemen, baik dari pemerintah maupun masyarakat. "Dengan adanya rencana ini, kita memperkuat langkah dan sinergitas untuk menjalankan visi pembangunan Kota Makassar yang berdaya saing," ujar Irwan di hadapan para anggota DPRD.

Dia menambahkan, bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan serta peluang bagi Kota Makassar. "Kita menghadapi dinamika yang beragam, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Semua ini menuntut kebijakan yang strategis dan mampu mengantisipasi perubahan dengan baik," jelas Irwan.

Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada

seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang telah bekerja keras dalam menyusun Rencana Kerja ini. Menurutnya, perencanaan tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, mencakup kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar.

"Saya mengapresiasi upaya ini karena DPRD berhasil menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan," tambahnya.

Irwan berharap melalui rencana kerja yang telah ditetapkan, seluruh program dan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana kerja ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dan pijakan dalam membangun Kota Makassar ke arah yang lebih baik, sejalan dengan visi pembangunan kota yang semakin maju dan berdaya saing.

Hal ini penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD Kota Makassar harus terus dipertahankan demi tercapainya tujuan bersama.



Banggar DPRD Makassar Bahas Nota **Kesepakatan KUA APBD 2025**



Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar, dalam rangka pembahasan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar sekaligus Ketua Banggar Andi Suharmika (Fraksi Golkar), didampingi Wakil Ketua III Eric Horas. Yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (7/11/2024).

Nota Kesepakatan KUA APBD tahun 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD tahun 2025.

Dari TAPD Makassar diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Makassar A Zulkifly serta sejumlah anggota TAPD lainnya.

Banggar Gelar Rapat Lanjutan Pembahasan **KUA PPAS** **Rancangan APBD 2025**



Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat lanjutan pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) rancangan APBD tahun 2025.

Rapat berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (8/11/2024), yang dipimpin oleh Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Makassar.

Arah prioritas pembangunan Kota Makassar tahun 2025, diantaranya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta perwujudan kota wisata yang berbudaya.

KUA PPAS rancangan APBD Kota Makassar tahun 2025 bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain demi mewujudkan prioritas pembangunan Kota Makassar tahun 2025.

DPRD Makassar Terima Aspirasi Solidaritas Aktivis Pemerhati Hukum Sulsel

DPRD Kota Makassar menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis Pemerhati Hukum Sulsel, Jumat (8/11/2024), di gedung DPRD Makassar.

Aspirasi ini diterima langsung sejumlah anggota DPRD Makassar yaitu, Tri Sulkarnain (Fraksi Mulia), Meinsani Kecca (Fraksi PPP), dr Fahrizal (Fraksi PKB), dan Arifin Majid (Fraksi Golkar).

Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menyatakan bahwa toko yang dimaksud bernama Bintang Anugrah Triputra, yang berlokasi di Jl Sembilan, Kecamatan Bontoala, Makassar.

Toko ini diduga belum mengantongi dokumen perizinan terkait pergudangan dan penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para

mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan, diantaranya:

1. Mendesak DPRD Kota Makassar untuk segera melakukan RDP terkait maraknya gudang dalam kota yang beraktivitas tanpa mematuhi aturan kawasan pergudangan.
2. Mendesak Disperindag Kota Makassar untuk menindaki bangunan yang diduga gudang penyuplai miras di wilayah Kecamatan Bontoala.
3. Tegakkan aturan Peraturan Walikota Makassar No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Gudang dalam Kota dan Perda No. 53 Tahun 2015 tentang Kawasan Pergudangan yang mewajibkan semua aktivitas gudang dipusatkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA).
4. Evaluasi kinerja Kadis Perindag Kota Makassar.



Ketua DPRD Didaulat Baca Sejarah Kota pada **Peringatan Hari Jadi Makassar ke-417**



Ketua DPRD Kota Makassar Supratman didaulat Baca sejarah kota di Peringatan Hari Jadi Kota Makassar yang ke-417 tahun 2024, Sabtu (9/11/2024), di Lapangan Karebosi Makassar.

Ketua DPRD Makassar Supratman membacakan sejarah panjang terbentuknya kota Makassar, mulai di bawah kepemimpinan Belanda hingga kepemimpinan Jepang. Masa pemerintahan dari masa ke masa.

Peringatan Hari Jadi Makassar ke-417 ini mengambil tema "KOTA MAKASSAR BAHAGIA. SEJAHTERA,

TANGGUH,

Tema kali ini menggambarkan perjalanan dan pencapaian Kota Makassar yang terus berupaya menghadirkan kota yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkualitas bagi warganya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan kesejahteraan bagi warga Makassar, dalam hal ini lapangan kerja baru, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Sekretaris DPRD Makassar Turut Hadiri Peringatan Hari Jadi Makassar ke-417 di Lapangan Karebosi



Sekretaris DPRD Kota Makassar H. Dahyal turut menghadiri Peringatan Hari Jadi Kota Makassar yang ke-417 tahun 2024, pada Sabtu (09/11/2024), di Lapangan Karebosi Makassar.

Tema kali ini menggambarkan perjalanan dan pencapaian Kota Makassar yang terus berupaya menghadirkan kota yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkualitas bagi warganya.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Supratman membacakan sejarah panjang terbentuknya kota Makassar, mulai di bawah kepemimpinan Belanda hingga kepemimpinan Jepang. Masa pemerintahan dari masa ke masa.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan kesejahteraan bagi warga Makassar dalam hal ini lapangan kerja baru, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Peringatan HUT Makassar ke-417 ini mengambil tema "Kota Makassar Bahagia, Sejahtera, Tangguh.

Sejahtera juga mencakup kesejahteraan sosial, di mana masyarakat Makassar dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.



Rapat Banggar DPRD Makassar Dengarkan Sejumlah Prioritas Setiap OPD

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar lanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Palfon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, pada Sabtu (9/11/2024).

Agenda ini dalam rangka mendengarkan sejumlah

prioritas setiap OPD mulai dari rencana penerimaan hingga rencana belanja daerah.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua I DPRD Makassar Andi Suharmika, didampingi oleh Kepala Bappeda Makassar Andi Zulkifli.

DPRD Makassar Kawal Aspirasi Atlet Disabilitas, Tuntutan Bonus Jadi Fokus Utama



Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, dan Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menerima kunjungan dari Aliansi Gerakan Pemuda Mahasiswa Atlet Makassar di Gedung DPRD Makassar, Senin (11/11/2024).

Aliansi ini datang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait bonus bagi atlet penyandang disabilitas yang telah meraih prestasi sejak tahun 2022 namun belum menerima hak mereka.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah mahasiswa dan atlet disabilitas menyampaikan rasa kekecewaan mereka atas hak bonus yang belum terpenuhi

hingga kini.

Mereka mengharapkan perhatian dari pihak Pemerintah Kota Makassar untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas upaya keras para atlet disabilitas yang telah mengharumkan nama kota.

Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, mengaku sangat prihatin dengan keadaan ini. Ia menyatakan bahwa atlet disabilitas telah berjuang keras demi prestasi yang membawa kebanggaan bagi Makassar, sehingga sudah sepatutnya mereka mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah.

Menurutnya, keterlambatan pemberian bonus ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap para atlet disabilitas, yang tak hanya bersaing di tingkat lokal tetapi juga nasional.

"Atlet disabilitas telah memberikan segalanya untuk membawa nama Makassar ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan menjembatani pertemuan antara atlet disabilitas dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, untuk mendengar langsung kendala yang menghambat pemenuhan hak mereka," ujar Muchlis.

Seluruh Komisi DPRD Makassar Gelar Rapat Bersama Mitra Kerja

Seluruh komisi di DPRD Makassar gelar Rapat Kerja bersama Mitra terkait Program kerja dan kegiatan OPD di gedung DPRD Makassar, Senin (11/11/2024).

Rapat ini akan menjadi bahan masukan komisi-komisi untuk diberikan pada Konsultasi Badan Anggaran.

Komisi A dipimpin Ketua Komisi A, Andi Pahlevi (F-Gerindra) mengawali rapat kerja bersama

camat se-Kota Makassar.

Komisi B dipimpin Ketua Komisi B, Ismail (F-Golkar) mendengar sejumlah penjelasan beberapa Perusda Kota Makassar.

Komisi C dipimpin Ketua Komisi C, Azwar (F- PKS) bertemu dengan Dinas PU, dan beberapa OPD.

Komisi D dipimpin Ketua Komisi D, Ari Azhari Ilham (F-Nasdem) menggelar rapat kerja dengan Dinas kesehatan, Kebudayaan,

dan Direktur RSUD Daya.

Dari pembahasan program kerja dan kegiatan, SKPD diharapkan menetapkan sejumlah program Kerja prioritas yang tentunya berdampak besar kepada masyarakat terkhusus hak-hak atau pelayanan dasar.

Selanjutnya hasil pembahasan ini menjadi bahan pertimbangan Badan Anggaran untuk diputuskan.



Camat Ujung Tanah Hadir Rakor Bersama Komisi A DPRD Makassar

Camat Ujung Tanah Amanda Syahwaldi menghadiri rapat koordinasi bersama Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Rapat berlangsung pada hari Senin (11/11/2024) di Gedung DPRD Makassar. Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung Ketua Komisi A, Andi Pahlevi (F-

Gerindra), mengawali rapat kerja bersama seluruh camat se-Kota Makassar.

Dalam rapat ini membahas terkait program kerja dan kegiatan SKPD sebagai bahan masukan komisi untuk diberikan pada Konsultasi Badan Anggaran nantinya.



Sekretariat DPRD Makassar Raker Bersama Komisi A, Bahas Program Prioritas Tahun 2025

Sekretariat DPRD Makassar mengikuti rapat kerja bersama Komisi A DPRD Makassar, terkait program kerja dan kegiatan sebagai bahan masukan Komisi untuk diberikan pada Konsultasi Badan Anggaran. Rapat dilaksanakan pada Senin (11/11/2024) di Gedung DPRD Makassar.

Gerindra), rapat ini dihadiri juga para jajaran Kepala Bagian Sekretariat DPRD.

Diantaranya, Kepala Bagian Umum, Dr. Muhajir, Kepala Bagian Persidangan, Widyawati, Kepala Bagian Humas & Protokol, Syahril dan Kepala Bagian Keuangan Abdul Kadir, beserta sejumlah pejabat Fungsional

Sekretariat DPRD Makassar.

Sekretaris DPRD Makassar H. Dahyal memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2025, terkhusus kegiatan penunjang kegiatan Kedewanan yang berdampak langsung ke masyarakat. Dipimpin Ketua Komisi A, Andi Pahlevi (F-





Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Terkait Anggaran Pembinaan Prestasi Atlet dan Cabor

Komisi D DPRD Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, KONI, beserta Forum Cabang Olahraga Makassar, di gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (12/11/2024).

RDP ini membahas surat masuk dari Forum Cabang Olahraga Anggota KONI Kota Makassar terkait proses pencairan anggaran KONI Kota Makassar tahun 2024 untuk pembinaan prestasi

atlet dan Cabang Olahraga Kota Makassar.

Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi D, dr. Fahrizal (F-PKB) didampingi Wakil Ketua Komisi D Rezki Nur (F-PKS).

Dihadiri Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar Andi Engka, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, serta sejumlah perwakilan Forum Cabang Olahraga.

Komisi C DPRD Terima Aspirasi FPR Terkait IMB dan Izin Usaha Pertokoan

Komisi C DPRD Makassar terima Aspirasi sejumlah demonstran yang tergabung dalam Front Pembebasan Rakyat (FPR) Sulsel, Selasa (12/11/2024).

Kedatangan FPR ini, menyampaikan terkait dugaan tidak dimilikinya izin mendirikan bangunan dan izin Analisis Dampak lalu lintas dan sejumlah izin berusaha oleh beberapa pertokoan yang ada di jalan bontolempangan.

Aspirasi ini diterima langsung Ketua Komisi C Azwar (F-PKS), bersama

wakil ketua Komisi C Fasruddin Rusli (F-PPP), Sekretaris Komisi C Ray Suryadi (F-Mulia), dan sejumlah anggota DPRD Komisi C diantaranya, Irwan Hasan (F-PPP), dan Imam Musakkar (F-PKB).

Dengan adanya aspirasi ini, pihak DPRD Makassar akan mengagendakan pertemuan dengan menghadirkan pemilik dan pengelola sejumlah pertokoan yang di adukan untuk mengklarifikasi adanya dugaan tersebut.



DPRD Bersama Pemkot Makassar Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025



DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024-2025 di DPRD Kota Makassar, yang berlangsung di Kantor DPRD Makassar pada Selasa (12/11/2024).

Dokumen kesepakatan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Makassar Supratman dan Pj Sekda Makassar Irwan Adnan, menandai komitmen bersama antara DPRD dan Pemkot Makassar dalam penyusunan anggaran yang akan menjadi pedoman pembangunan kota di tahun mendatang.

Sebelum penandatanganan, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan ada sekitar 40-an

catatan yang diserahkan kepada Pemkot untuk ditindaklanjuti.

Catatan tersebut mencakup berbagai isu strategis, seperti alokasi anggaran, peningkatan fasilitas pelayanan publik, solusi air bersih, dan rehabilitasi infrastruktur di lingkup OPD Kota Makassar.

Menanggapi hal itu, Irwan Adnan menyebut catatan itu menjadi atensi Pemkot Makassar.

"Alhamdulillah, kita telah melewati satu tahapan untuk melaksanakan rancangan APBD 2025. Semoga kesepakatan KUA-PPAS 2025 ini bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Makassar," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa berbagai masukan dari DPRD akan menjadi perhatian khusus dalam proses perencanaan APBD 2025, mengingat masukan tersebut mewakili aspirasi masyarakat.

Banggar DPRD Makassar Kunker di DPRD Badung Bali

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar melakukan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (14/11/2024).

Kunker ini dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda APBD tahun 2025.

Rombongan banggar dipimpin langsung Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.

Hadir mendampingi Kabag Persidangan Widiawati Said beserta sejumlah staf Sekretariat DPRD Makassar.



Wakil Ketua DPRD Makassar Bersama Forkopimda Cek Kesiapan Logistik KPU

Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq (Fraksi PKS) bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke gudang logistik KPU Kota Makassar, Jumat (15/11/2024).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan logistik KPU dalam menghadapi pilkada tanggal 27 November mendatang.



Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis hadir langsung pada kunjungan ini.

DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna **Penjelasan Wali Kota Terhadap Ranperda APBD 2025**



DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama di Kantor DPRD Makassar, Senin (18/11/2024). Agenda rapat paripurna adalah Penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025. Pj Sekda Kota Makassar Irwan R Adnan hadir mewakili Pjs Wali Kota Makassar menyampaikan Penjelasan.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq, didampingi Wakil Ketua III Eric Horas. Dalam penjelasannya, Irwan menyampaikan, APBD Kota Makassar tahun 2025 mencapai Rp5,7 triliun.

Itu terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp5,4 triliun lebih, dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,7 triliun. Sementara Rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar pada 2025, direncanakan sebesar Rp2,4 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan target

Anggaran 2024 sebesar Rp2,3 triliun lebih, maka terdapat peningkatan.

Irwan mengatakan, akan terus berkomitmen untuk menjaga perencanaan yang lebih baik.

"Penyusunan APBD 2025 dilakukan, dengan memastikan setiap program yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Kami berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah," katanya pada sela-sela acara.

Ia mengatakan, tentu prioritasnya tetap pada kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta aspirasi yang telah muncul dari Musrenbang maupun hasil reses anggota dewan. Olehnya itu, membutuhkan sinergi antar OPD juga elemen masyarakat, untuk meningkatkan kinerja, sehingga kontribusi dari berbagai sektor dapat mendukung pendapatan daerah secara signifikan.

Jalin Silaturahmi Forkopimda, Dandim 1408/BS Berkunjung ke DPRD Makassar

Dalam rangka silaturahmi dan koordinasi Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Komandan Kodim 1408/BS Makassar Letkol Inf Franki Susanto berkunjung ke Kantor DPRD Makassar, Senin (18/11/2024).

Franki Susanto diterima langsung oleh Ketua DPRD Makassar Supratman di ruang kerja Ketua DPRD Makassar.

Turut hadir para Wakil Ketua DPRD Makassar yaitu Andi Suharmika, Anwar Faruq, dan Eric Horas, serta sejumlah anggota DPRD Makassar.

Kunjungan ini dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergitas yang baik.



Fraksi-fraksi DPRD Makassar Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Penjelasan Wali Kota



DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat paripurna pada hari Selasa (19/11/2024) di gedung DPRD Makassar.

Sebanyak sembilan orang juru bicara fraksi tampil menyampaikan pandangan umum fraksi mereka.

Kali ini agendanya adalah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Penjelasan Walikota Makassar atas Ranperda APBD tahun 2025.

Para jubir fraksi tersebut adalah; Yulius Patandianan (Fraksi Amanat Persatuan Indonesia), Odhika Chandra (Fraksi Nasdem), Ruslan Mahmud (Fraksi Golkar), Hartono (Fraksi PKS), Fasruddin Rusli (Fraksi PPP), Fahrizal (Fraksi PKB), Muh Farid Rayendra (Fraksi Gerindra), William (Fraksi PDIP), dan Tri Sulkarnain (Fraksi Mulia).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq, dan dihadiri oleh Pj Sekda Kota Makassar Irwan Rusfiadi Adnan yang mewakili Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis.



Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar, Peningkatan PAD Tuai Apresiasi

Pj Sekretaris Daerah, Irwan Adnan hadir rapat paripurna kedelapan masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 DPRD Kota Makassar.

Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (19/11/2024).

Rapat Paripurna dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq.

Fraksi PPP dalam Pemandangan Umumnya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar yang dimana PAD kita mengalami peningkatan sebesar Rp100 Milyar atau 4,2% dari APBD Pokok Tahun 2024.

Sementara itu dari Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas keinginan

Pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari komponen Pajak Daerah.

"Kami berharap agar upaya ini dilakukan secara konsisten dengan secara serius menindaklanjuti saran-saran yang senantiasa FPKS sampaikan untuk memaksimalkan capaian pendapatan dengan bekerja terintegrasi dan berkolaborasi dengan seluruh komponen terkait serta memaksimalkan penggunaan IT System yang dapat dipantau oleh publik," ungkap Hartono dari FPKS

Fraksi PKS juga berharap agar sistem reward bagi pelaksana yang berhasil senantiasa mendapat perhatian pemerintah.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan diikuti pula oleh perwakilan beberapa OPD lingkup Pemkot Makassar.



Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP, Terkait Pembayaran Ganti Rugi Tanah Warga



Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan pembayaran ganti rugi atas tanah warga di Jalan Gatot Subroto, Baru, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

Rapat berlangsung di ruangan Komisi A DPRD Makassar, Rabu (13/11/2024).

Sejumlah lahan ini dijadikan fasilitas umum (fasum) oleh

Pemerintah Kota Makassar. Pihak pemilik lahan hanya meminta kepada Pemkot Makassar untuk menaati putusan pengadilan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Andi Pahlevi (F-Gerindra), didampingi Wakil Ketua Komisi A Ruslan Mahmud (F-Golkar) beserta sejumlah anggota Komisi A DPRD Makassar.

DPRD Makassar Desak Pemkot Cairkan Dana Hibah KONI 2024

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Makassar, KONI, Dispora, dan Inspektorat berlangsung hangat saat membahas isu pencairan dana hibah untuk KONI Makassar yang masih tertunda.

Anggota Komisi D, Muhlis Misbah, meminta Pemerintah Kota Makassar segera menyelesaikan sisa pencairan anggaran KONI tahun 2024 dan mengatur anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dalam rapat tadi, kami menyoroti dua hal utama. Pertama, sisa anggaran KONI 2024 yang belum cair. Kami meminta Pemkot Makassar segera menindaklanjutinya karena dana tersebut sudah digunakan untuk kegiatan yang berjalan. Jika tidak dibayarkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini bisa menjadi isu besar," ujar Muhlis di ruang komisi D DPRD Kota Makassar, Selasa (12/11/2024).

Namun, pencairan dana hibah ini menghadapi aturan khusus berdasarkan

Perwali Nomor 23 Pasal 17, yang mensyaratkan persetujuan langsung dari wali kota untuk mencairkan dana.

Mengingat posisi wali kota saat ini dijabat oleh Pjs Wali Kota, Andi Arwin Azis, Komisi D meminta Pemkot Makassar segera mengkaji apakah pencairan bisa dilanjutkan dengan kondisi saat ini.

"Tentu kami berharap pencairan sisa anggaran KONI 2024 dapat dilakukan tanpa melanggar aturan yang ada. Pemerintah kota perlu memberi masukan kepada Pjs Wali Kota untuk memberikan disposisi terkait pencairan ini," jelasnya.

Komisi D juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk pembinaan olahraga di Makassar tahun 2025.

"KONI harus mendapatkan anggaran yang layak demi keberlangsungan pembinaan atlet di kota ini, termasuk gaji pelatih yang merupakan bagian penting dari program pembinaan," ujarnya.

Beri Kuliah Umum, Sekretaris DPRD Makassar Jelaskan Tentang Proses Legislasi Daerah



Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, H. Dahyal, menjadi pembicara utama dalam kuliah umum bertema "Proses Legislasi Daerah Partisipasi publik dan peluang digitalisasi dalam urusan legislasi daerah".

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, pada Jumat (22/11/2024). Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Makassar Dr. Muhajir hadir mendampingi Sekwan Dahyal.

Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum.

Dalam paparannya, Dahyal menjelaskan secara komprehensif mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah (perda), mulai dari tahap inisiasi, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi

antara eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi untuk memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Proses legislasi daerah adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa legislasi yang baik, pembangunan daerah akan sulit terarah dan berdampak luas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam memberi masukan terhadap rancangan peraturan daerah," jelasnya.

Selain membahas teknis legislasi, Dahyal juga membagikan pengalamannya selama bertahun-tahun bekerja di lingkungan DPRD.

Ia mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam proses legislasi adalah memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.



DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2025 yang selama ini dibahas antara Pemerintah Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar akhirnya disepakati dalam sidang paripurna masa sidang ke 11 tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Makassar, Senin (25/11/2024).

Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dan memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) tentang APBD Kota Makassar tahun anggaran 2025.

Kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD ini ditandai dengan ketok palu dari pimpinan sidang yakni Ketua DPRD Makassar Supratman, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Ranperda menjadi Perda oleh Wali Kota

Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dan Wakil Ketua DPRD Andi Suharmika dan disaksikan oleh pimpinan sidang dan seluruh anggota DPRD serta undangan yang hadir.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang hadir langsung mengatakan, dengan disetujuinya Ranperda jadi Perda ini, maka pihak Pemkot Makassar beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta akan berkomitmen untuk melaksanakan Perda sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, kata Danny, eksekutif bersama legislatif ini telah menyelesaikan lagi salah satu produk hukum yang sangat strategis pada anggaran tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Pjs Wali Kota Paparkan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda APBD 2025

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar Supratman, didampingi oleh dua wakil ketua yaitu Anwar Faruq dan Eric Horas.

Pjs Wali Kota Arwin Azis menegaskan bahwa penyusunan RAPBD Tahun 2025 telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berbagai peraturan lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan.

"RAPBD ini disusun secara bijak dengan fokus pada skala prioritas agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta memperhatikan prinsip perencanaan yang matang dan inovatif. Semuanya berpedoman pada RPJMD dan RKPD Kota Makassar," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi masukan dari fraksi-

fraksi DPRD yang dinilai mendukung komposisi APBD 2025.

Beberapa poin penting yang harus dijawab meliputi pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana alam, hingga persiapan Pilkada Serentak 2024.

"Kami berharap tulisan lanjutan dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan agar mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Makassar," tambahnya.

Dia optimis APBD Kota Makassar semakin kondusif dan harmonis yang mana semua target-target kinerja diimplementasikan.

Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2025 dapat terlaksana dengan baik, terjalin hubungan kerja yang baik dan terjaga antara eksekutif dan legislatif.



FOTO: ISTIMEWA



Wakil Ketua DPRD Makassar Terima Audiensi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNM

Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Andi Suharmika menerima kunjungan dalam rangka audiensi dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (21/11/2024).

Andi Suharmika menerima audiensi para mahasiswa ini di ruang penerimaan tamu DPRD Makassar, dengan didampingi Kepala Bagian Humas Protokol Sekretariat DPRD Makassar Syahril.

Sejumlah perbincangan yang terjadi dalam audiensi ini diantaranya, terkait lembaga legislatif yang bertugas membentuk peraturan daerah (Perda) dan memberikan persetujuan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2024



Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2024 pada hari ini, Senin (25/11/2024). Ucapan ini disampaikan melalui akun media sosial DPRD Kota Makassar.

Pada momentum Hari Guru Nasional ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar, menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh guru di Indonesia, khususnya di Kota Makassar.

Guru adalah pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, terdapat dedikasi luar biasa untuk

membangun generasi penerus yang cerdas, bermoral, dan berakarakter. Di tengah berbagai tantangan, para guru tetap menjadi pelita yang tak kenal lelah menerangi jalan anak bangsa.

Mari kita bersama-sama mendukung perjuangan para guru, termasuk dalam memastikan kesejahteraan mereka, meningkatkan mutu pendidikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang layak untuk anak-anak kita.

Selamat Hari Guru Nasional! Teruslah menjadi inspirasi, teruslah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, dan teruslah mendidik generasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sekretariat DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Korpri ke-53

Sekretariat DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada Jumat (29/11/2024) hari ini.

"Pada hari yang bersejarah ini, kami mengucapkan Selamat Hari KORPRI yang ke-53 kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Semoga KORPRI terus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjadi wadah yang menguatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," tulis akun media sosial Setwan Makassar.

"Di usia yang semakin matang, mari kita tingkatkan profesionalisme, dedikasi, dan integritas dalam setiap langkah kerja kita. Semoga KORPRI terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," sambungnya.



"Selamat bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan dalam setiap tugas yang diemban," harapnya.

Anggota DPRD Kota Makassar Reses Pertama Awal Desember

Mengawali masa jabatan, anggota DPRD Makassar yang baru akan melaksanakan kegiatan reses di penghujung tahun ini. Kegiatan yang akan berlangsung mulai 2 Desember hingga 6 Desember 2024.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis para wakil rakyat untuk mendengar langsung keluhan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, setelah 50 anggota DPRD Makassar dilantik.

"Dewan akan melaksanakan reses pekan depan. Iya ini reses pertama tahun sidang pertama bagi anggota dewan yang dilantik bertemu dengan konstituen di dapil masing-masing," kata Dahyal, Sekwan DPRD Makassar, Kamis (28/11/2024).



Selain itu, ia juga membeberkan tidak ada perubahan besar yang terjadi di DPRD Makassar yang berkenaan dengan wewenang, fungsi, dan tugas DPRD. Perubahan itu terimplementasi dalam kerja kerja legislasi DPRD Makassar.

"Sama seperti kemarin, sekarang ini kegiatan dewan kegiatannya pada fungsi pengawasan akan bertemu dengan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat DPRD

Kota Makassar, Muh Yusran, mengaku, agenda reses merupakan kegiatan rutin para anggota dewan setiap tahunnya. Sementara reses dilaksanakan tiga kali setahun.

"Setiap empat bulan dewan laksanakan reses. Itu sudah wajib dilakukan dan sudah dianggarkan di APBD, jadi tiga kali mereka laksanakan (dalam setahun)," bebernya.

Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyampaikan, reses kali ini memiliki makna khusus karena menjadi kesempatan

perdana bagi anggota baru untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

"Reses ini adalah langkah awal kami memperkuat hubungan dengan

masyarakat, sekaligus memastikan suara mereka benar-benar terwakili di parlemen," jelasnya.

Reses yang akan berlangsung di berbagai titik ini diharapkan menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk memahami kondisi di lapangan secara lebih mendalam. Beberapa isu utama yang kemungkinan akan banyak dibahas adalah peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta penanganan permasalahan sosial.



DPRD Makassar Soroti Minimnya Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal

Rendahnya partisipasi tenaga kerja lokal dalam proyek strategis di Kota Makassar, termasuk di Kawasan Industri Makassar (KIMA), kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena masyarakat sekitar kawasan industri tidak sepenuhnya merasakan manfaat keberadaan proyek-proyek besar tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Arifuddin, warga Tamalanrea, yang mengaku sulit mendapatkan pekerjaan di KIMA meskipun tinggal di sekitar kawasan itu. "Kami sering mengajukan lamaran, tapi selalu ditolak. Padahal, banyak pekerjaan di KIMA yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh tenaga lokal," ungkapnya dengan nada kecewa.

Selain itu, masyarakat menilai perusahaan-perusahaan di KIMA kurang proaktif dalam memberikan pelatihan atau program pengembangan keterampilan bagi warga sekitar. Akibatnya, banyak warga lokal merasa terpinggirkan.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengatakan keluhan terkait minimnya kesempatan kerja untuk warga lokal sudah sering disampaikan, terutama saat reses. Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kerja sama pemerintah dengan perusahaan di kawasan industri.

"Warga di sekitar Kapasa dan Bira sering mengeluh

soal pengangguran dan minimnya penerimaan tenaga kerja lokal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ada apa dengan pola kerja sama selama ini?" ujarnya, Kamis (28/11/2024).

Data DPRD menunjukkan hanya sekitar 30 persen tenaga kerja di KIMA berasal dari Kota Makassar. Sementara itu, mayoritas tenaga kerja didatangkan dari luar daerah dengan alasan kompetensi dan kebutuhan teknis tertentu.

"Padahal, kita memiliki banyak tenaga kerja yang bisa dilatih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini justru memperburuk tingkat pengangguran di Makassar," tambah Suharmika.

Dewan Minta Direksi Perusda-BUMD Mundur Jika Gagal Penuhi Target

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak agar direksi Perusahaan Daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kinerjanya dianggap tidak optimal segera mengundurkan diri, daripada menunggu proses evaluasi yang panjang.

Pernyataan tersebut, mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar bersama sejumlah pejabat terkait Anggaran dan program kerja di APBD Pokok 2025. dinilai gagal memenuhi target pendapatan berkontribusi pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini disampaikan, anggota Banggar DPRD Makassar, Adi Akbar menyampaikan penilaian terhadap terhadap kinerja jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD yang menurun hingga akhir tahun.

"Tentu publik mempertanyakan kinerja pemerintah terkhusus direksi Perusahaan Daerah dan BUMD kita.

Hingga akhir tahun ini, ada beberapa catatan yang menurut kami kinerja mereka menurun, maka lebih elegan jika mereka mengundurkan diri daripada terus bertahan dengan kinerja yang mengecewakan," ungkapnya, Selasa (26/11).

"Walaupun kami mengapresiasi adanya

komitmen untuk mengevaluasi kinerja seluruh pengurus BUMD, tetapi hasilnya tetap tidak memenuhi ekspektasi masyarakat," tambahnya.

Apalagi, turunnya target retribusi daerah dalam APBD Pokok 2025.

Penurunan ini mencapai 54 persen, atau sebesar Rp139 miliar, dari Rp257 miliar lebih di 2024 menjadi Rp118 miliar lebih di 2025. Belum lagi, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menurun 42,1 persen, dari Rp 88 miliar di 2024 menjadi Rp51 miliar di 2025.

"Makanya perlu dilakukan evaluasi karena PAD kita juga. Karena nilai APBD Pokok 2025 kita diturunkan ini menjadi bagian dri kegagalan BUMD kita, ini kerja justru menjadi beban," Katanya.





DPRD Makassar Harap OPD Agar Efektif dan Efisien Menggunakan Anggaran

Rapat Paripurna masa sidang ke tujuh tahun 2024 dimana pada paripurna tersebut terkait dengan Ranperda RAPBD tahun anggaran 2025 yang digelar di gedung DPRD Makassar Jalan Ap Pettarani Senin kemarin 18/11/24. Terkait dengan RAPBD 2025 Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq menegaskan akan meningkatkan pengawasan agar APBD Pokok 2025 bisa konsisten.

Olehnya itu DPRD juga meminta agar OPD agar lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran. 'Ujarnya usai Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Makassar terkait Ranperda APBD Pokok 2025 di Sekretariat DPRD Kota Makassar, Senin (18/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa, pada serapan belanja dan pendapatan Pemkot Makassar kerap kali tak terkejar sesuai target. Hasilnya, APBD harus dikoreksi,

dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan.

Tahun anggaran 2024 misalnya, pada APBD Pokok disepakati Rp5,73 triliun, namun terkoreksi di APBD perubahan menjadi Rp5,29 triliun, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi kita harus perbaiki. ."tutur Anwar Faruk.

Pada APBD 2025, program infrastruktur diharapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya jalan dan drainase, layanan pendidikan hingga kesehatan.

"Yang paling penting ialah infrastruktur, sekarang ini masih banyak genangan atau banjir yang ada di masyarakat, kemudian diperparkiran, peningkatan pelayanan dan perbaikan dari kualitas pendidikan dan kesehatan, harapan ke depan lebih bagus lagi,"tandasnya lagi.

ADAMA Inovasi Tingkatkan Transparansi Anggaran di DPRD Makassar

ASN Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Muhammad Akbar Rasyid, melakukan aksi perubahan di bidang anggaran dengan memperkenalkan sebuah inovasi sistem pengelolaan anggaran yang diberi nama ADAMA.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam proses pengalokasian anggaran di Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Akbar Rasyid mempresentasikan inovasi ini di hadapan dua auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, yakni Yully Syahriar dan Ayu Sondang Hasian Boru, Sabtu, (16/11/2024).

Dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa ADAMA (Efektivitas Pelaporan PBJ – Pengadaan Barang dan Jasa) adalah

sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan akuntabilitas alokasi dana anggaran melalui penyedia barang.

"Melalui ADAMA, kami berharap dapat memfasilitasi pengalokasian anggaran yang lebih transparan dan efisien. Ini adalah langkah untuk memastikan setiap dana yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," ujar Akbar Rasyid, yang akrab disapa Ocha.

Aksi perubahan ini merupakan bagian dari implementasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kota Makassar Angkatan I, yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar bekerja sama dengan PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional

LAUNCHING
DI SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TERHADAP RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
EFEKTIVITAS PELAPORAN PBJ "ADAMA"
ALOKASI DANA ANGGARAN MELALUI PENYEDIA
PADA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

Oleh :
MUHAMMAD AKBAR RASYID, S.T.
NIP : 197510032014121001
KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

NDH: 23



Dokter Jelaskan Makanan Ini Bisa Bantu Hancurkan Batu Ginjal



Beberapa makanan memang bisa dijadikan pengobatan. Ada juga makanan penghancur batu ginjal yang bisa dijadikan salah satu cara mencegah penyakit tersebut semakin parah. Dokter spesialis urologi Eka Hospital Permata Hijau Alberth Ivan Parasian mengatakan, pada dasarnya tidak ada makanan yang langsung bisa mengobati batu ginjal. Hanya saja, ada makanan yang diyakini bisa membantu menghancurkan batu ginjal.

"Kalau untuk langsung menyembuhkan sebenarnya tidak ada, tapi kalau membantu menghancurkan ada," kata Alberth di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Alberth mengaku selalu menyarankan buah lemon atau jeruk nipis untuk pasiennya yang mengalami batu ginjal. Karena secara logika dari keilmuan, batu bisa pecah dengan makanan asam.

Dengan demikian, buah lemon dan jeruk nipis bisa jadi makanan penghancur batu ginjal. Buah lemon hingga jeruk nipis mengandung sitrat. Jika asam sitrat terus menimpa batu ginjal, maka akan hancur perlahan.

"Kalau batunya tersusun karena asam urat, nah si asam sitrat dari lemon atau jeruk ini bisa memecah batu tersebut," kata dia.

Dia pun menyarankan agar orang dengan batu ginjal minum minuman air lemon atau jeruk nipis setiap hari.

"Kalau mencari makanan penghancur batu ginjal saya akan sarankan minuman air lemon atau jeruk nipis. Meskipun bukan untuk mengobati, tapi bisa mencegah dan membantu [batu hancur]," katanya.

Bolehkah Olahraga saat Pilek?

Pilek jadi 'tamu' yang sering datang selama musim hujan. Apakah harus absen olahraga karena pilek? Hal ini tergantung seberapa parah gejalanya.

Hari-hari yang dingin ditambah kehujanan membuat orang rentan mengalami sesesma.

Berbeda dengan influenza, biasanya sesesma ditandai dengan pilek dan demam. Rasanya sesesma tak terlalu berat sehingga tetap bisa beraktivitas termasuk olahraga. Akan tetapi, bolehkah olahraga saat pilek?

Dokter umum NHS Jeff Foster berkata, ada kelebihan dan kekurangan berolahraga saat sakit.

"Sisi positifnya, jika Anda mengalami penyumbatan dan merasa sedikit pusing, berolahraga dapat menjadi cara untuk membantu membersihkan sekresi, membuka dada, melegakan hidung tersumbat, mempercepat metabolisme, merangsang nafsu makan, meningkatkan kualitas tidur, dan melepaskan endorfin agar Anda merasa lebih baik," terang Foster, seperti dilansir dari The Independent.

Sisi negatifnya, lanjut dia, olahraga seperti memberikan tekanan pada sistem imun yang sudah bekerja keras menghadapi

penyakit. Pilek bisa berlangsung lebih lama karenanya.

Sementara itu, Edward R. Laskowski, dokter dengan sertifikasi kesehatan olahraga, mengatakan bahwa Anda tetap bisa olahraga saat pilek selama tidak ada demam.

"Aktivitas fisik ringan hingga sedang biasanya baik jika Anda ada sesesma dan tidak demam. Olahraga bisa membantu Anda lebih baik dengan membuka saluran hidung dan meredakan hidung tersumbat untuk sementara," kata Laskowski, mengutip dari Mayo Clinic.

Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah jalan kaki. Aktivitas fisik ini bakal memberikan banyak manfaat, apalagi jika dilakukan di tengah udara yang segar.

Idealnya, seseorang menghabiskan 10 ribu langkah dalam berjalan kaki. Namun, saat kondisi tubuh sedang tidak terlalu fit, jalan kaki sebanyak 4.500 langkah saja dianggap sudah cukup dan membawa manfaat.





STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Dr. MUHAJIR. S.KM, M.Kes
Kepala Bagian Umum

ABDUL KADIR, SE, MM
Kepala Bagian Keuangan

DAHIAL, S.
Sekretaris DPRD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

AHMAD JAYA, SH
Kasubag Rumah Tangga

MUHAMMAD AKBAR RASYID, S.T
Kasubag Perlengkapan

MUHAMMAD ICHSAN, S.Sos, M.Si
Kasubag Kepegawaran

ORGANISASI KOTA MAKASSAR

Sos, M.Si
Kota Makassar



SYARIL S.STP.
Kepala Bagian Humas & Protokol



Dr. Hj. WIDIAWATI SAID, S.Sos., S.Pd.
Kepala Bagian Persidangan

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL



TABLOID **UMAH RAKYAT**

• DPRD KOTA MAKASSAR